



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT SIDANG VIRTUAL KONFERENSI KETUA PARLEMEN DUNIA KE-5 (FIFTH WORLD CONFERENCE OF SPEAKERS OF PARLIAMENT), VIENNA – AUSTRIA, TANGGAL 20 AGUSTUS 2020

Tahun sidang	: 2020 – 2021
Masa persidangan	: I
Jenis Rapat	: Sidang Virtual
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 20 Agustus 2020
Pukul	: 19.00 – 20.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III Lantai 3
Acara	: Sidang Virtual <i>Fifth World Conference of Speakers of Parliament</i>
Ketua Rapat	: Endah T.D. Retnoastuti
Sekretaris Rapat	: Chairil Patria, S.IP., M.Si.
Hadir	: <u>DELEGASI DPR RI</u> 1. Dr. (H.C.) Puan Maharani (Ketua DPR RI) 2. Dr. H. Fadli Zon (Ketua BKSAP DPR RI) 3. Charles Honoris (Wakil Ketua DPR RI)

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Dr. Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI)
2. Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Bidang Persidangan)
3. Endah T.D. Retnoastuti (Kepala Biro KSAP)

BAGIAN SEKRETARIAT KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Chairil Patria, S.IP., M.Si.
2. Haryanti, S.A.B., M.A.P.
3. Miranti Widiani, S.Sos., M.Si.
4. Hery Prasetyo
5. Iis Anisa, S.E., M.Si.M
6. Renaldi Setiawan, S.IP.
7. Miftahudin
8. Yudi Prawira, S.IP.

TENAGA AHLI

1. Patria Ginting (TA Ketua DPR RI)
2. Heriyono Adi Anggoro (TA BKSAP DPR RI)
3. Dewi Amelia Tresna Wijayanti (TA BKSAP DPR RI)

STAF KHUSUS KETUA DPR RI

Budiyono

KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Kamapradipta Isnomo (Direktur Sosial Budaya OINB)

PENERJEMAH
Yuliana Tansil

TV PARLEMEN:
1. Okky Zulindra
2. Kristio

BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
1. Andi Rachwana Putra
2. Muhammad Khairuddin Makmun

PROTOKOL
1. Mu'ammil Rokhiliy, S.Sos.
2. Albert Antonio, S.A.P.

I. PENDAHULUAN

1. Delri terdiri dari Ibu Dr. (H.C.) Puan Maharani (Ketua DPR RI), Bapak Dr. Fadli Zon (Ketua BKSAP DPR RI) dan Bapak Charles Honoris (Wakil Ketua BKSAP DPR RI).
2. Panel diskusi Ketiga di *the Fifth World Conference of Speakers of Parliament* dengan tema "*Improving Governance by Bridging the Gap Between Parliaments and the People*" menghadirkan Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani menjadi Pembicara beserta Pembicara yang lain yaitu, Mr. Jan Anthonie Bruijn (Ketua Senat Belanda), dan Panelis Ahli yaitu, Ms. Phumzile Mlambo Ngcuka (Direktur Eksekutif PBB untuk Urusan Wanita) dan Mr. Fabrizio Hochschild-Drummond (*Special Advisor to the UN Secretary General of the UN 75th Anniversary*).
3. Moderator pada panel diskusi Ketiga tersebut, Ms. Claire Doole membuka acara sidang virtual pada pukul 19.30 WIB dilanjutkan dengan pemaparan para Pembicara dan Panelis Ahli, serta tanggapan dari Peserta.

II. KESIMPULAN

1. Mr. Jan Anthonie Bruijn, Ketua Senat Belanda menguraikan aktivitas parlemennya sejak pandemi merebak. Sejak Maret 2020, Senat telah menutup gedungnya dan beralih ke digital untuk segala pertemuan. Pertemuan kombinasi dilakukan dengan tetap pertemuan fisik dan digital. Setidaknya satu wakil per kelompok politik di Senat harus hadir dalam setiap pertemuan. Pada saat bersamaan, Senat mencari gedung yang lebih memadai untuk memungkinkan seluruh anggotanya bertemu fisik sembari menjaga jarak sesuai protokol (setidaknya 1.5 meter). Saat ini, Senat Belanda tengah mendalami usulan protokol darurat baru untuk mengganti protokol darurat pemerintah yang berdampak pada hak masyarakat secara langsung. Baginya, hingga saat ini demokrasi adalah satu-satunya sistem yang memiliki kapasitas untuk *self-correction* sehingga *check and balance* dapat terjaga.

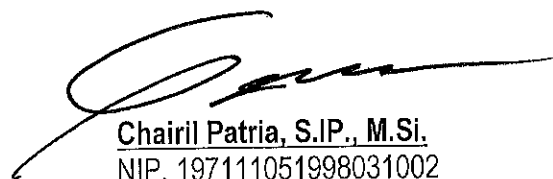
2. Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI menegaskan DPR RI tidak berhenti sejenak pun untuk bekerja di tengah kekhawatiran rakyat dan beban ekonomi yang bertambah. Anggota parlemen harus cepat menghasilkan Undang-Undang (UU) yang dapat membantu mengatasi dampak pandemi COVID-19 dengan tetap menangkap aspirasi rakyat. Pada saat-saat sulit seperti inilah, masyarakat memiliki kebutuhan untuk lebih dekat dengan parlemen dalam menyampaikan aspirasinya. Ketua DPR RI menyebut terobosan diperlukan untuk membuat kehadiran parlemen lebih berarti dalam menjaga kepercayaan rakyat.
3. Cara-cara baru telah diperkenalkan dalam kenormalan baru untuk memastikan tugas DPR dapat terus berjalan dengan lancar dan produktif termasuk dengan kombinasi virtual dan tatap muka dalam rapat-rapat di DPR. Ketua DPR RI juga mengungkapkan Parlemen telah mengembangkan Sistem Informasi Legislasi (SILEG) yang lebih baik di website DPR untuk penggunaan yang lebih mudah (*easy user interface*). DPR juga hadir di media sosial dalam bentuk saluran layanan pengaduan baik dalam perangkat *mobile* dan dalam jaringan (Daring) agar rakyat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasinya. Pusat Perancangan UU di DPR, sebagai salah satu sistem pendukung kerja parlemen, juga membuka ruang partisipasi publik Daring dalam pembahasan RUU inisiatif DPR. Para pakar, akademisi, lembaga pemikir dan organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.
4. Sidang ini menghasilkan *outcome document Declaration on Parliamentary Leadership for More Effective Multilateralism that Delivers Peace and Sustainable Development for the People and Planet*. Delegasi Indonesia telah memberikan masukan-masukan/input yang seluruhnya di akomodir oleh IPU dan Panitia. Dalam pembahasan *outcome document* tersebut, Delegasi DPR RI mengajukan berbagai usulan. Usulan pertama mengenai penguatan multilateralisme. Hal ini mengingat dalam kondisi dunia yang tengah menghadapi pandemi global, dibutuhkan multilateralisme yang efektif. Saat ini dunia tengah membutuhkan kerjasama internasional dan aksi-aksi di tataran multilateral untuk mencari solusi global. Ini bukan waktu yang tepat bagi negara-negara untuk terfragmentasi. Solidaritas internasional menjadi kunci untuk keluar dari krisis kesehatan yang bertransformasi menjadi krisis multidimensional. Usulan kedua terkait emisi karbon global. Pandemi COVID-19 telah mengurangi frekuensi lalu lintas orang, barang dan jasa. Hal ini berakibat positif terhadap pengurangan emisi karbon. Kondisi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh negara-negara dan menjadi momentum untuk bertransisi menuju *climate-neutral economy*, perlindungan keragaman hayati dan transformasi menuju industri agro.
5. *Outcome document* memuat kesepakatan-kesepakatan terutama terkait peran parlemen dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan terutama di tengah situasi tidak menentu akibat COVID-19. Krisis kesehatan global ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi antar negara dan menggarisbawahi kebutuhan akan sistem multilateralisme yang efektif.
6. Terkait respon terhadap pandemi, *outcome document* menggarisbawahi mengenai kerja sama tenaga medis dan obat-obatan, serta kerjasama pencegahan, deteksi, test, pengobatan dan tracing. Digarisbawahi juga mengenai *leading role* WHO dalam *global governance* dan kesiapsiagaan *emergency* kesehatan.

7. Terkait dampak COVID-19 terhadap ekonomi, *outcome document* menggarisbawahi mengenai koordinasi kebijakan makroekonomi dan menjaga kestabilan pasar keuangan global. Untuk jangka panjang, pertumbuhan ekonomi harus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menuju keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi harus juga berpijak pada *green economy* dan model pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan pelestarian lingkungan, terutama untuk industri ekstraktif, perikanan dan pertanian, manufaktur dan jasa. Pertumbuhan ekonomi harus pula berbasis gender dan mempertimbangkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda. *Outcome document* juga menegaskan kembali komitmen bagi perdagangan multilateral yang adil, terbuka dan tanpa diskriminasi di bawah WTO.
8. Pandemi COVID-19 selayaknya tidak mengalihkan perhatian dunia dari krisis lainnya yaitu perubahan iklim. Dalam kerangka kesepakatan yang lebih besar lagi, pandemi ini selayaknya tidak mengalihkan perhatian dunia dari upaya-upaya pencapaian SDGs. Tujuan pembangunan global yang tercakup dalam 17 Goals tersebut merupakan cetak biru untuk pencapaian tujuan pembangunan bersama melalui kerjasama internasional. Tahun ini merupakan awal dari SDGs *Decade of Action* dan oleh karena itu negara-negara harus meningkatkan upaya-upaya mewujudkan agenda menjadi realita.
9. Terakhir, *Outcome document* memuat pula kesepakatan atas komitmen pemenuhan kesetaraan gender, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberdayaan generasi muda terutama partisipasi dalam politik.

III. PENUTUP

Diskusi Panel Ketiga Virtual ini ditutup pada pukul 20.30 WIB oleh Presiden IPU, Hon Gabriela Cuevas Baron dengan menyimpulkan bahwa bahwa keputusan-keputusan yang diambil Parlemen untuk *build back better* harus tetap menempatkan rakyat di posisi sentral. Keputusan yang diambil Parlemen mempengaruhi kehidupan berbagai lapisan masyarakat sehingga Parlemen harus terus mendekatkan diri dengan masyarakat. COVID-19 membawa perubahan pola interaksi antar manusia dan disinilah Parlemen harus mampu berinovasi untuk menjembatani antara anggota parlemen dan konstituen. Kondisi pandemi ini idealnya tidak mempengaruhi kerja-kerja parlemen. Terkait diplomasi parlemen, Parlemen harus tetap efektif dalam menerjemahkan kesepakatan global ke dalam realitas nasional. COVID-19 menjadi ujian untuk kemampuan Parlemen beradaptasi serta kemampuan Parlemen untuk memanfaatkan tantangan menjadi kesempatan. Parlemen harus tetap bekerja untuk mewujudkan dunia yang sejahtera, stabil, dan inklusif.

SEKRETARIS RAPAT



Chairil Patria, S.IP., M.Si.
NIP. 197111051998031002